



URGENSI PEMBENTUKAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL MELALUI PROGRAM KURIKULER DI INDONESIA

Ana Indriana

Anaindriana48@gmail.com

Kenlies Era Rosalina Marsudi

Marsudikenlies@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi peran pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler pada pendidikan formal dalam membentuk karakter kewarganegaraan multikultural. Peneliti juga berusaha untuk menyajikan konsep dan strategi pendidikan multikultural melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang tepat dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang toleran, bermoral dan bertanggung jawab sebagai elemen dari kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. Konten karya ilmiah ini disajikan secara teoretik berdasarkan data hasil studi literatur. Karya ilmiah hasil penelitian ini dibuat sebagai strategi bagaimana membentuk warganegara yang toleran terhadap adanya keberagaman dalam bangsa yang plural seperti bangsa Indonesia ini. Upaya membentuk karakter kewarganegaraan yang toleran dalam pendidikan formal tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Peserta didik tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi juga harus memiliki kebajikan/akhlak kewarganegaraan (civic virtue) yang terdiri atas watak kewarganegaraan (civic disposition) dan komitmen kewarganegaraan (civic commitment) sebagai dasar mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demi terbentuknya budaya kewarganegaraan (civic culture) berdasarkan nilai-

nilai Pancasila. Rancangan pembelajaran berbasis multikultural tidak hanya dirumuskan di atas kertas tetapi yang terpenting diaktualisasikan dalam kehidupan riil di lembaga pendidikan sebagai program berkelanjutan. Pendidikan multikultural yang berorientasi pada nilai-nilai budaya berkeadaban dengan berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan, diaktualisasikan dalam pembelajaran untuk menghasilkan luaran subjek didik yang memiliki kompetensi berwawasan, memiliki sikap arif dan bijak serta memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif terhadap permasalahan multikultural dalam menjaga integrasi dan keharmonisan.

Kata kunci: Kewargaan multikultural, Karakter, Pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Multikulturalisme merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, sebagai potensi yang harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya apabila keberagaman ini tidak dimanfaatkan, dan dibina secara benar akan berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis multikulturalisme merupakan suatu keharusan dan apabila tidak dilakukan saat ini akan berubah menjadi malapetaka. Saat ini keberagaman sering dipandang sebagai perbedaan, perbedaan semakin dipertajam dan sering dimanfaatkan sebagian orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi atau golongannya. Ini menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal yang menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia dan menimbulkan kerusuhan dan permusuhan terjadi dimana-mana.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip *bhinneka* tetapi terintegrasi dalam kesatuan (*Bhinneka Tunggal Ika*), untuk itu PKn menemukan momentumnya menjadi topik yang sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat multikulturalisme Indonesia tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, progra-

matias, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan (Cogan, 1998: 116).

Perguruan tinggi sebagai institusi mempunyai fungsi tidak hanya sekedar *transfer of knowledge* tetapi lebih penting lagi sebagai *transfer of values*. Faktualitas perbedaan etnis, agama, ras dan budaya, justru dapat dijadikan pembelajaran dalam membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap subyek belajar dalam membangun multikulturalisme. Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudice* untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat diartikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya (*the pride in ones's home nation*). Penerapan PKn yang memuat pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) peserta didik akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Dari latar belakang pemikiran di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana urgensi pembentukan karakter kewargaan multikultural melalui program kurikuler di Indonesia yakni melalui mata kuliah PKn. Pembahasan dalam makalah ini akan dibatasi pada sebuah kajian dan perenungan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis kebutuhan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural secara akademis dan kurikuler sehingga mampu menemukan konsep dan strategi implementasi pendidikan multikultural yang tepat sasaran melalui PKn di perguruan tinggi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme secara etimologis terbentuk dari tiga kata yaitu: multi (banyak), kultur (budaya), isme (aliran/paham). Yang berarti multikulturalisme adalah aliran atau paham tentang banyak budaya yang berarti mengarah pada keberagaman budaya. Istilah multikulturalisme berarti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok

etnis di dalam suatu *nation-state* melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan dan bidang lainnya (Tilaar, 2004: 387). Sedangkan Musa Asy'arie dalam Choirul Mahfud (2008: 103) berpendapat bahwa multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan diri sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.

Menurut Farida Hanum dan Setya Raharja (2011: 115) nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, pluralisme. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Pendidikan yang mengusung tema multikultural saat ini menjadi isu yang cukup menarik di Indonesia. Secara terminologis pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia agar dapat menghargai pluralitas dan heterogenitas. Banks & Banks (2005: 3) mendefinisikan bahwa:

“Multicultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process. Multicultural education incorporates the idea that all students regardless of their gender and social class and their ethnic, racial, or cultural characteristics should have an equal opportunity to learn in school.”

Berdasarkan pendapat Banks & Banks maka pendidikan multikultural mencakup tiga hal yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di pendidikan formal tanpa memandang jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik etnis, ras, atau budaya. Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakangnya. Konsep pendidikan multikultural ditujukan untuk membekali peserta didik agar dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan.

Gollnick & Chinn (2006: 6) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membahas tentang keragaman budaya dan kese-

taraan di lembaga pendidikan. Kesetaraan tersebut dimaksudkan bahwa semua peserta didik diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh keragaman. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 191) menambahkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap saling menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat. Agus Salim (2006: 25) menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses yang memberikan penyadaran dalam keragaman hidup bersama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan sikap toleransi, menghargai, dan menghormati keragaman ras, etnis, budaya, agama, bahasa, sosial, ekonomi, jenis kelamin sehingga dapat menerima dan hidup bersama dalam keragaman tersebut tanpa menimbulkan permasalahan. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik yang berasal dari ras, etnis, budaya, agama, bahasa, kelas sosial ekonomi dan jenis kelamin yang berbeda mendapat kesempatan yang setara dan adil untuk mengenyam pendidikan di sekolah dan dalam pembelajaran.

2. Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Nu'man Soemantri memberikan pengertian bahwa PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000:7).

Sunarso, dkk (2008: 1), menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau sistemik PKn dibangun atas

paradigma sebagai berikut, *pertama* PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab. *Kedua*, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengung- sung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran kehidupan bermasyarakat, lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara yang baik, berakhlak mulia, mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu berperan dalam masyarakat.

Secara sederhana tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang lebih baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan (Cholisin, 2004: 12). Menurut *National Council for The Social Studies* (NCSS/ Dewan Nasional untuk Ilmu Pengetahuan Sosial) NCSS mengajukan tujuan PKn yaitu: “..... *civic education today seeks to create citizens who are informed, analytic, committed to democratic values, and actively involved in society*” yang artinya kondisi dewasa ini meminta untuk membuat warga negara terinformasi, analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan terlibat aktif dalam masyarakat).

3. Masyarakat Kewargaan dan Kewargaan Multikultural

Kewargaan multikultural adalah sebuah konstruksi negara bangsa yang memperhatikan secara serius adanya keragaman dalam sebuah negara. Negara tidak bisa hanya memperhatikan satu komunitas tertentu lantas meniadakan komunitas lainnya atas nama etnis atas nama agama atau atas nama golongan. Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) harus ditempatkan dalam ruang publik yang sama posisinya, tanpa memperhatikan mana

yang memberikan kontribusi terbesar pada kemajuan negara. Mungkin ini dianggap tidak adil tetapi konsepsi multikulturalisme adalah menghargai dan menghormati seluruh aspek kehidupan yang ada dalam sebuah negara. Pengakuan akan hak-hak seluruh warga negara akan berimplikasi pada pengakuan politik, hak minoritas, hak kebebasan beragama (keyakinan), hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan tempat tinggal dan perumahan, hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan secara maksimal dari negara. Negara harus memihak rakyatnya, bukan kekuasaannya.

Sementara Willy Kymlicka (2002: 13) meyakini bahwa masyarakat modern semakin sering diperhadapkan dengan kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka dan diterimanya perbedaan budaya mereka, maka hal itu secara tidak langsung dikatakan sebagai tantangan atas multikulturalisme. Namun, istilah multikulturalisme sendiri mencakup pelbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri. Ada berbagai cara di mana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan ini mempengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas.

Ciri-ciri masyarakat kewargaan seperti dikemukakan oleh Putnam (1993: 89-91) mencakup *civic engagement; political equality; solidarity, trust, tolerance*; dan adanya *associations* sebagai *social structures of cooperation*. *Civic engagement* berarti bahwa kewarganegaraan dalam sebuah *civic community* ditandai oleh partisipasi aktif dalam urusan-urusan publik. *Political equality* mencakup pengertian bahwa kewarganegaraan dalam *civic community* memerlukan kesetaraan hak-hak dan kewajiban untuk semua warga, komunitas diikat oleh hubungan horizontal yang resiprositas dan kooperasi, bukan oleh hubungan vertikal dan dependensi. *Solidarity, trust, tolerance* tampak dalam perilaku saling membantu, memiliki kepercayaan penuh satu dengan lainnya meskipun memiliki pandangan berbeda, tetapi tetap toleran. *Associations (Social Structures of Cooperation)* diartikan sebagai asosiasi masyarakat kewargaan yang menyumbangkan keefektifan dan stabilitas pemerintahan demokratis, baik dari pengaruh “internal” atas anggota secara individual maupun dampak “eksternal” atas pemerintahan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh Peneliti yaitu riset kepustakaan (library research) dengan model analisis induktif. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Melalui analisis induktif akan memunculkan berbagai macam tema, kategori dan pola hubungan di antara kategori tersebut. Riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2). Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan dan hasil penelitian yang terkait dengan kewargaan multikultural dan pembelajaran PKn di lembaga pendidikan. Setelah dianalisis, maka tersusunlah gagasan pikiran tentang urgensi pembentukan karakter kewargaan multikultural melalui program kurikuler di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Program Kurikuler Dalam Membentuk Karakter Kewargaan Multikultural

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai program kurikuler yang berwujud mata kuliah dalam membentuk karakter kewargaan bagi peserta didik pada lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Bahasan dalam makalah ini didorong oleh hasil penelitian Paulette Patterson Dilworth (2008) dalam tulisan yang berjudul *Multicultural Citizenship Education* dalam *The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy* yang disunting oleh James Arthur, Ian Davies dan Carole Hahn. Inti dari tulisan tersebut memperlihatkan arti penting gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) penting diwujudkan melalui proses pendidikan kewarganegaraan pada lembaga pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan Jonathan Miller-Lane, Tyrone C. Howard & Patricia Espiritu Halagao (2007) mengidentifikasi bahwa kompetensi kewargaan multikultural dapat dikembangkan melalui beragam kajian pembelajaran seperti *social studies* yang di dalamnya memuat topik pendidikan kewarganegaraan

seperti di Amerika Serikat. Dengan *civic multicultural competence* diharapkan para pengajar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat global yaitu masyarakat multikultural.

Realitas masyarakat multikultural (*multicultural society*) Indonesia tergambar dalam masukan (input) peserta didik dalam lingkup pendidikan. Hampir di setiap lembaga pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan pendidikan, mereka juga akan berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan. Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas yang peserta didiknya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim *The LIFE Center* dan *Center for Multicultural Education di University of Washington*, Seattle USA, merumuskan pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (*learning principles*) untuk peserta didik yang multikultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.

1. *Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is mediated by local cultural practices and perspectives.*
2. *Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and valued practices of everyday lives across the life span.*
3. *All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to promote their personal and intellectual development.*
4. *Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and community language resources as a basis for expanding their linguistic repertoires. (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007).*

Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Para peserta didik perlu diajak

untuk memahami lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal, yaitu budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya, *genuine* manusia Indonesia. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kampus memerankan peran strategis dalam memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan kampus, maupun pada lingkungan luar pendidikan yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis berkeadaban berdasarkan Pancasila.

Upaya di atas tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Peserta didik tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi juga harus memiliki kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*) yang terdiri atas watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*) sebagai dasar mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan pemerintahan demi terbentuknya budaya kewargaan (*civic culture*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif budaya kewargaan, pemahaman tentang budaya kewargaan (*civic culture*) tidak bisa dilepaskan dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). *Civic culture* dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik. Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi.

Masyarakat Multikultural Indonesia Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks Negara kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada

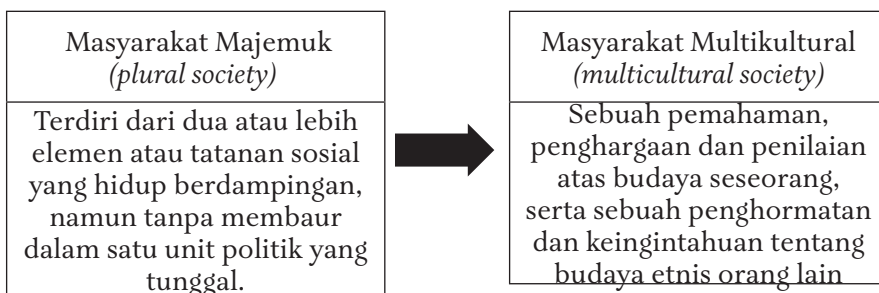
setiap jamannya itu.

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan procedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam keberagaman, secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (alinea 2); "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (alinea 3); "...maka disusunlah Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepadadst...kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, .."(alinea 4). Kata rakyat yang selalu disebut dalam konstitusi tersebut pasti menunjuk pada masyarakat Indonesia yang multikultural dengan selogan Bhinneka Tunggal Ika itu. Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi dalam dan untuk masyarakat yang bersifat multikultural. Hal ini mengandung arti bahwa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang bersifat multikultural.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005: 98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat.

Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 1 Transformasi Masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika



Perubahan cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme yang melandasi realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung. Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Sebagai dasar kehidupan bernegara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dan kebajikan kewargaan bagaimana membangun kebajikan kewargaan di lembaga pendidikan, terlebih pada masyarakat multikultural Indonesia? tantangan pengajar pendidikan kewarganegaraan sekarang adalah menjadikan mata kuliah itu berkhidmat kepada dan mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena keanekaragaman yang ada. Proses pendidikan kewarganegaraan harus bersandar secara kukuh kepada budaya Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-benilai, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan pertanggungjawaban.

Lembaga pendidikan menurut Banks sedapat mungkin mempersiapkan

para peserta didik dari berbagai ras, etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan merefleksikan budaya dan komunitas kewargaan (Banks, 2007: 76). Kebutuhan untuk membina generasi yang akan datang dengan kemampuan menyusun kerangka moral imajinatif kian penting bukan saja untuk menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang rasional dan saling menghargai, tetapi juga penting untuk menjaga keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai kebajikan kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Upaya meminimalisir konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Konsep dan Strategi Pendidikan Multikultural Melalui PKn untuk Membentuk Karakter Kewargaan Multikultural

Pada bab sebelumnya sudah diuraikan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dalam membentuk karakter kewargaan multikultural. Kemudian dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana cara mengimplementasikan peran tersebut dengan baik, maka akan diuraikanlah bagaimana konsep dan strategi dalam melakukan pembelajaran PKn berbasis multikultural tersebut agar peserta didik tidak hanya mengetahui atau memahami namun juga mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, selain itu membuat peserta didik menjadi warga negara yang kritis sehingga mampu memperjuangkan hak-hak orang lain yang berkaitan dengan konsep multikultur.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang tak dimiliki oleh bangsa lain ini, menjadi modal sosial dengan konstruksi berbasis kearifan lokal (*local genius*). Heterogenitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab tersebut

tentunya harus dijaga dan dilestarikan sebagai khasanah budaya nasional. Dalam konteks hubungan sosial (interaksi sosial) baik secara horizontal maupun vertikal dalam realita pluralitas tersebut, dibutuhkan instrumen pendidikan yang berkarakter terbuka, inklusif, toleran dan pluralis. PKn sebagai media sosio-kultural menjadi jembatan antara realita sosial dengan sikap yang mesti ditunjukkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah warga sekolah seperti pengajar dan peserta didik. Terminologi pendidikan multikultural menjadi istilah yang relevan untuk dikembangkan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai bangsa yang plural. Mengutip M. Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para peserta didik seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah (M. Ainul Yaqin, 2007:25).

Jelas sekali bahwa unsur utama dalam pendidikan multikultural adalah penempatan posisi peserta didik sebagai subjek yang bersifat sejajar. Tidak ada superioritas satu komponen kultural seorang peserta didik terhadap lainnya. Maka pendidikan multikultural ini dapat melatih dan membangun karakter peserta didik mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. PKn memiliki posisi strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan konflik. Sebab nilai-nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembiasaan nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial (A. Fuad Fanani, 2004:16).

Pendidikan multikultural ini bisa dimasukkan secara inheren (integral) dalam semua jenis pembelajaran. Walaupun dalam format kurikulum nasional menjadi suatu mata pelajaran yang mandiri (berdiri sendiri), tetapi bersifat integratif dengan pelajaran lainnya. Namun penulis lebih memandang jika pendidikan multikultural secara integral bisa masuk ke dalam bingkai ilmu sosial khususnya PKn. Sebagaimana dijelaskan Chapin dan Mossick, dengan menggunakan pendekatan *integrated* yang menggunakan persamaan perspektif yang dirangkai dalam bidang ilmu sosial. Rumusan secara umum tentang ilmu sosial adalah kajian tentang berbagai kejadian dalam alam sekitar dan perilaku manusia dalam berbagai kelompok, dan bentuk kehidupan sosial maupun situasi atau kejadian di masa lampau atau hari ini (Conny R.

Semiawan, 2008). Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran melalui berbagai pendekatan dan model pembelajaran yang efektif, dalam menyampaikan pesan kesadaran kultural kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah melalui gagasan pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural. Secara garis besar yang harus dilakukan oleh para pengajar Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan gagasan pendidikan multikultural dalam pelajaran PKn yang ialah dengan melakukan beberapa hal yang sifatnya bertahap seperti berikut ini:

1. Mengembangkan pembelajaran multikultural yang inovatif, dengan karakteristik: (a) *student centered approach*; (b) *contextual learning* melalui cara mengkaitkan kompetensi dasar dengan tema-tema multikulturalisme yang ada disekitar lingkungan subyek belajar; (c) multi model dan metode serta strategi pembelajaran multikultural; (d) multi media; (e) multi sumber belajar; (f) multi evaluasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Mengembangkan model pembelajaran berbasis multikultural, yang meliputi: (a) merumuskan kompetensi pembelajaran multikultural bagi subyek belajar yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*disposition*); (b) menetapkan posisi pengajar sebagai *director of learning* dalam menerapkan pendekatan multikultural; (c) analisis terhadap latar kondisi peserta didik yang multikultural; dan (d) mengembangkan materi pembelajaran yang bernuansa multikultural melalui analisis materi yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural.
3. Menyusunan rancangan pembelajaran berbasis multikultural, melalui empat tahapan utama, yakni: (1) analisis isi (*content analysis*); (2) analisis latar kultural (*setting analysis*); (3) pengorganisasian materi (*contents organizing*); dan (4) menyusun format model pembelajaran berbasis multikultural.

Rancangan pembelajaran berbasis multikultural di atas, tidak hanya dirumuskan di atas kertas tetapi yang terpenting diaktualisasikan dalam kehidupan riil di lembaga pendidikan sebagai program berkelanjutan. Pendidikan multikultural yang berorientasi pada nilai-nilai budaya berkeadaban dengan berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan, diaktualisasikan dalam pembelajaran multikultural di

kelas untuk menghasilkan luaran subjek didik yang memiliki kompetensi: (1) berwawasan dan berpengetahuan luas tentang konsep multikulturalisme; (2) memiliki sikap arif dan bijak sebagai anggota masyarakat yang multikultur; dan (3) memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif terhadap permasalahan multikultural dalam menjaga integrasi dan keharmonisan.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai dan mengevaluasi, maka prasarat utama yang harus dimiliki pengajar adalah kemampuan dalam membangun model pembelajaran yang efektif, inovatif dan menyenangkan namun tetap relevan dengan realita di lingkungan masyarakat. Pendekatan *integrated learning* dan *cooperative learning* adalah beberapa model pendekatan yang efektif dalam memasukkan pendidikan multikultural ke dalam PKn di kelas. Beberapa poin penting yang harus dilakukan dalam memformulasikan pendidikan multikultural dalam PKn yang bersifat mudah dan efektif yaitu:

1. Pengajar harus merencanakan strategi pembelajaran yang akan dipakai dalam kelas. Slavin (1984) mengatakan bahwa *cooperative learning* adalah suatu model pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif anggotanya terdiri dari 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen (Etin Solihatin dan Raharjo, 2007:4). Jika yang dipakai adalah model *cooperative learning*, maka strategi ini digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan peserta didik dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam konteks belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi *cooperative learning*, diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi peserta didik dalam memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, peserta didik memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang berbeda suku, agama etnis dan budayanya, memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola konflik dengan tanpa keke-

- rasan (*conflict non violent*).
2. Pembelajaran multikultural yang dilaksanakan di kelas oleh peserta didik bisa dimulai dari hal/perbuatan yang kecil namun penuh makna (*meaningfull*). Peserta didik dan pengajar bisa memulainya bersama dengan melakukan tindakan nyata di kelas yang menunjukkan keterampilan multikultural. Maksudnya adalah sikap yang ditunjukkan karena kesadaran kultural kemudian diimplementasikan dalam suatu tindakan dalam format kemajemukan. Secara praktis bisa dicontohkan yaitu di awal pertemuan biasanya pengajar memperkenalkan diri kepada peserta didik dan begitu sebaliknya. Dalam perkenalan tersebut pasti dikemukakan identitas pribadi yang memang perlu untuk diinformasikan kepada peserta didik atau pengajar. Pengajar dan peserta didik dalam hal ini harus mengemukakan identitas pribadi khususnya identitas kulturalnya, seperti asal daerah, suku, agama bahkan asal daerah orang tua (menjadi lebih menarik bagi mereka yang melakukan perkawinan interkultural/antar budaya). Ini dimaksudkan agar pengajar memahami konstruksi sosio-kultural yang membangun peserta didik. Begitu juga bagi para peserta didik agar memahami perbedaan di antara teman sebagai sesuatu realita sosial yang mesti diterima bukan dijadikan potensi konflik. Kemudian dilanjutkan kepada sikap toleran dan inklusif antar budaya yang hidup di kelas.
 3. Jika menggunakan pendekatan *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn di kelas, maka pengajar bisa saja memberikan tugas misalnya kepada peserta didik yang telah dibagi dalam beberapa kelompok. Terpenting di sini yaitu pembagian kelompok tersebut harus dilakukan oleh pengajar dengan mempertimbangkan kemajemukan/multikulturalitas peserta didik tersebut. Umpamanya kelompok dibagi atas pertimbangan asal daerah, suku, agama gender dan kemampuan peserta didik. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari peserta didik yang berbeda secara multikultural. Agar terjadi interaksi antar pribadi yang berlatar berbeda secara horizontal. Ketika mereka telah berinteraksi diharapkan tumbuh sikap toleran, inklusif dan pluralis dalam diri peserta didik.
 4. Jika menggunakan pendekatan *integrated learning* dalam pembel-

ajaran PKn di kelas, maka pengajar harus memasukkan muatan pendidikan multikultural ke dalam materi-materi pembahasan PKn yang memang relevan. Seperti ketika belajar materi tentang HAM, demokrasi & masyarakat madani, budaya politik, Pancasila sebagai ideologi terbuka kemudian globalisasi. Contoh-contoh materi dalam PKn tersebut bisa diintegrasikan dengan pendidikan multikultural yang sifatnya integral dalam pembahasannya. Ini dilakukan agar materi PKn tersebut lebih terbuka dan koheren dengan muatan lain (pendidikan multikultural). Peserta didik dan pengajar juga tidak bosan dalam pembelajaran di kelas, karena selalu merelevansikannya dengan muatan multikulturalisme. Pengajar atau peserta didik bisa juga menghadirkan/membawa contoh-contoh alat peraga yang berkaitan dengan materi PKn tertentu tapi juga relevan dengan konten pendidikan multikultural. Seperti peserta didik disuruh membawa tayangan (dalam bentuk CD atau lainnya) cerita budaya daerah tertentu. Kemudian dikaitkan dengan materi budaya politik Indonesia atau masyarakat madani. Bisa juga peserta didik diminta mengemukakan contoh (tentu dengan bukti fisik agar lebih menarik) tradisi daerah, makanan daerah tertentu untuk dianalisis mengenai eksistensi berbagai tradisi lokal tersebut di tengah arus globalisasi sekarang.

Menggagas pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural ini merupakan satu metode dan strategi sederhana, dalam rangka menciptakan karakter anak bangsa yang bisa hidup dalam nuansa perbedaan. Menurut Malik Fajar bahwa PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Nadiroh, dalam Jurnal Kewarganegaraan, 2006:8). Hal ini terjadi karena salah satu tujuan PKn adalah membangun karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2006: 4). Pendidikan demokrasi yang menjadi bagian dalam konten PKn akan tercapai jika komponen-komponen sosio-kultural Indonesia sebagai bangsa, dipahami sebagai kekayaan alam nusantara. Komponen-komponen sosio-kultural tadi diformulasikan dalam bentuk pendidikan multikultural. Oleh pengajar sebagai mediator di kelas, dikonstruksi sebuah pendekatan sederhana tapi penuh makna dalam PKn yaitu berbasis multi-

kultural. Pembelajaran PKn sekaligus berisikan pendidikan multikultural bisa dan mudah dilaksanakan karena cirinya yang sederhana, bisa berulang (kontinuitas) dan terjangkau (karena bisa dilakukan langsung di kelas oleh pengajar bersama peserta didik). Dengan model sederhana ini diharapkan pembelajaran PKn akan lebih bermakna bagi peserta didik dan tetap menjadi muatan pembelajaran strategis dalam upaya membangun karakter bangsa (*nation and character building*).

KESIMPULAN & SARAN

PKn sebagai pembelajaran dalam jalur pendidikan formal memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman multikulturalisme kepada peserta didik bila mereka terjun ke masyarakat. Oleh karena itu multikulturalisme sebagai ciri utama masyarakat Indonesia, merupakan lingkup materi yang harus mendapat tempat dalam pelajaran PKn. Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan multikultural, proses pembelajaran menekankan pada bagaimana memperlakukan peserta didik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan kepentingannya. Dalam proses pembelajaran peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, analitik, dan demokratis sehingga mereka dapat menemukan konsep, prinsip, dan nilai. Dari sini dipelajari peran pendidikan dan proses pembelajaran PKn yang berkaitan dengan materi multikulturalisme. PKn mempunyai peran penting untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan yang mereka temukan dalam masyarakat multikultural, serta menghormati keberbedaan sosial, kultural dan keberagaman budaya. Perlu ditekankan kembali bahwa keanekaragaman tanpa adanya kesederajatan bukan multikulturalisme, oleh karena itu “pendidikan multikultural” dengan pengertian di atas harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang keanekaragaman dan kesederajatan kultur.

Peserta didik harus memahami bahwa perbedaan nilai dan budaya antara etnik, agama, adat istiadat, antara orang Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Sasak, Bugis, Madura dan seterusnya bukanlah suatu pemicu konflik tetapi merupakan materi yang justru bisa memperkaya keanekaragaman dan sangat bisa hidup dengan harmonis. Untuk dapat memahami konsep ini terlebih dahulu peserta didik harus memahami konsep hak asasi manusia (HAM), demokrasi,

keadilan, hukum, dan politik. Lembaga pendidikan sebagai bagian integral dari masyarakatnya memiliki peserta didik yang karakteristiknya beragam sebagai cerminan dari masyarakatnya. Kampus di kota-kota besar merupakan contoh yang paling tepat menunjukkan keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa dan sebagainya. Kampus harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini, karena undang-undang dan kurikulumnya sudah memfasilitasi ke arah pendidikan multikultural. PKn berbasis pendidikan multikultural tidak bermaksud untuk menyamakan atau menyatukan budaya yang sangat beraneka ragam tersebut. PKn berbasis pendidikan multikultural bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman pada peserta didik agar mereka menyadari bahwa walaupun berbeda sosial dan budayanya, namun tetap satu yaitu sebagai warga negara Indonesia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan sederajat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun warga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari warga negara lainnya.

PKn berbasis pendidikan multikultural harus tetap menghargai keberbedaan, baik perbedaan individual (fisik, jenis kelamin, umur, warna kulit, dan tinggi badan), maupun perbedaan budaya, sosial, agama, bahasa, etnik dan golongan. Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan juga harus mempertimbangkan latar belakang budayanya. PKn tidak boleh menggeneralisasikan atau menyamaratakan orang yang berbeda-beda. Untuk ini maka PKn memegang peranan yang sangat penting. Jadi, PKn berbasis pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mampu menanamkan prinsip multikulturalisme yang merupakan suatu realita dalam kehidupan bangsa Indonesia. Prinsip dalam pendidikan multikultural adalah menanamkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengembangkan kesadaran untuk dapat menghargai adanya kebhinnekaan, keberagaman dan kesederajatan dalam masyarakat dan bernegara.

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu kiranya Penulis memberikan saran konstruktif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam PKn yang merupakan sarana paling strategis dalam mengembangkan karakter kewargaan multikultural, baik bagi tenaga pendidikanya maupun instansi yang menangani pendidikan. *Pertama*, demi terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif, para pendidik khususnya bagi pengajar mata pelajaran PKn harus mampu mema-

hami psikologi peserta didik serta latar belakang peserta didik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik karena perbedaan peserta didik yang satu dengan yang lain. *Kedua*, dalam proses pembelajaran pendidik harus memberi kesempatan yang sama terhadap peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku ataupun agama maupun gender semuanya memiliki hak yang sama. *Ketiga*, perlunya sosialisasi terhadap para pendidik ataupun masyarakat luas bahwa keberagaman adalah suatu keniscayaan yang sudah ada sejak dahulu, dan yang terpenting adalah menghargai pandangan, keyakinan dan budaya orang lain. *Keempat*, dalam pengembangan pendidikan yang berbasis multikultural harus ada budaya nasional yang nantinya akan menjadi *integrity icon* untuk mewujudkan kesatuan serta nasionalisme. Karena jika tidak maka generasi selanjutnya akan mudah terpengaruh oleh budaya global yang mungkin ada yang dapat meruntuhkan budaya luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. 2006. Stratifikasi Etnik Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arthur, James & Davies, Ian & Hahn, Carole. 2008. The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy: Multicultural Citizenship Education. London: Sage Knowledge Publisher.
- Banks, James A., and Banks, Cherry A. McGee. 2005. Multicultural Education: Issues and Perspectives (Revised Edition). United States: John Wiley & Sons.
- Choirul Mahfud. 2008. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholisin. 2000. IKN-PKN. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cholisin. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Cholisin. 2006. Perkembangan PKn Pasca KBK dan Praktek Pembelajarannya, Makalah dalam Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan KBK dan Menyongsong UU Pengajar dan Dosen di program Studi PPKn, FIS, Universitas Negeri Gorontalo, 20-21 September 2006.
- Cogan, J.W. 1998. *Developing The Civic Society: The role of Civic education*. Bandung: CISED.
- Conny R. Semiawan. 2007. Transdisiplinaritas Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pendidikan di Sekolah. Makalah dalam Acara Workshop Nasional di Pusat Bahasa Depdiknas.
- Farida Hanum dan Setya Raharja. 2011. Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural Menggunakan Modul Sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. Volume 04, Nomor 2. Hlm 113-128
- Fuad Fanani. 2004. Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagaman Liberatif. Jakarta: Kompas.
- Gollnick, Donna M., and Chinn, Philip C. 2006. Multicultural Education in A Pluralistic Society (Revised Edition). New Jersey: Pearson Education.
- H.A.R. Tilaar. 2004. MULTIKULTURALISME: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 01, Hal

68-74.

- Jonathan Miller-Lane, Tyrone C. Howard & Patricia Espiritu Halagao. 2007. "Civic Multicultural Competence: Searching for Common Ground in democratic Education," *Theory & Research in Social Education*, 35:4, 551-573
- M. Ainul Yaqin. 2007. Pendidikan Multikultural: *Cross-Cultural Understanding* untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nadiroh. 2006. Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia. Jakarta: Pustaka Keluarga,
- Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi. 2010. Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putnam, R. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
- Sunarso dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press
- Suparlan. 2005. Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Willy Kymlica. 2002. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

